

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Natuna Pada triwulan II yang berlangsung dari bulan April-Juni mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan, hal ini bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha. Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok dan penting pada triwulan II di Kabupaten Natuna:

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	Perubahan Harga (%)
1	Beras	15,800	16,200	16,200	0.02
2	Gula	17,643	17,714	17,714	0.00
3	Minyak Goreng	18,692	18,692	18,615	- 0.00
4	Tepung Terigu	12,625	12,500	12,500	- 0.01
5	Daging	140,000	140,000	140,000	-
6	Telur Ayam Ras	59,714	58,143	57,929	- 0.03
7	Cabe Merah	75,000	60,833	60,385	- 0.24
8	Bawang Merah Jawa	40,500	39,571	38,429	- 0.05
9	Kacang Kedelai	14,200	14,200	14,200	-

Dari tabel diatas menunjukan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Natuna tidak terjadi kenaikan harga pada komoditas beras dan gula, namun terjadi penurunan harga pada komoditas minyak goreng, tepung terigu, telur ayam ras, cabe merah dan bawang merah.

Bupati Natuna selaku Ketua TPID Kabupaten Natuna mendorong anggota TPID khususnya OPD untuk memperkuat dan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui sinergi dan inovasi pada pilar 4K TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal ini seiring dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Natuna No: 500/EKON-SDA/39/2025 tentang Pengawasan Ketersediaan dan Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446H.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna Bukan Daerah Penghasil.

Kabupaten Natuna bukanlah Daerah Produsen atau penghasil barang kebutuhan pokok, hampir semua bahan kebutuhan pokok Pemerintah Kabupaten Natuna berasal dari luar daerah Kabupaten Natuna yaitu dari Tanjungpinang, Pontianak, Batam dan Jakarta.

2. Kapasitas penyimpanan

Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa gudang disetiap Kecamatan di Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kendala ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan dalam pendistribusian barang dari daerah asal akibat jangka waktu pengiriman yang lama ataupun karena faktor cuaca.

3. HBKN

Seiring dengan HBKN Idul Fitri yang bertepatan pada tanggal 28 Maret s/d 7 April 2025. Terjadi peningkatan harga pada saat hari raya Idul Fitri dan berangsur turun pada akhir TW II di bulan Juni.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Tim TPID

Melakukan Koordinasi terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting di Kecamatan Bunguran Barat pada tanggal 8-10 Mei 2025.

2. Monitoring dan Koordinasi BBM

Dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Bunguran Barat pada tanggal 8-10 Mei 2025.

3. Pengawasan Bahan Pokok dan Penting

Pengawasan Bahan Pokok dan Penting oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun perlu dimaksimalkan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah.
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.
3. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat sistem logistik khususnya Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah terluar.

Diharapkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2.

untuk dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan dan Petani untuk meningkatkan hasil perikanan dan pertanian, sehingga Natuna bisa menjadi daerah penghasil.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dapat merekomendasikan penambahan maskapai atau menambah rute penerbangan dari dan keluar Natuna. Dimana hanya terdapat 2 maskapai yaitu Wings Air dan Nam Air. Sedangkan untuk rute penerbangan hanya Batam-Natuna dan Natuna Batam.